

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia pasca Orde Baru mengalami perubahan dalam penerapan sistem politik, dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Dengan diterapkan sistem demokratis memberikan perubahan terhadap dinamika kehidupan politik Indonesia setelah Reformasi.<sup>1</sup> Perbaikan demokrasi terus menjadi agenda pokok yang gencar dilakukan selama masa transisi, hingga Indonesia siap untuk demokrasi kontemporer.

Menurut Richard S. Katz, tidak ada diskusi tentang demokrasi kontemporer yang dapat mengabaikan fakta bahwa demokrasi modern niscaya adalah demokrasi perwakilan.<sup>2</sup> Dalam demokrasi perwakilan, instrument terpentingnya ialah partai politik. Partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Reformasi membawa perubahan pada sistem politik di Indonesia seperti perubahan dalam sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem hubungan pusat dan daerah serta adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berasosiasi untuk mendirikan dan atau membentuk partai politik (parpol). Perubahan tersebut dikenal dengan transisi demokrasi. Menurut O'Donnell dan Schmitter, ciri tipikal yang menandai fase transisi adalah ketika para penguasa otoriter, mulai memodifikasi peraturan-peraturan mereka sendiri sebagai mana jaminan yang lebih kuat bagi hak-hak individu dan kelompok. Lebih lanjut Rujuk Lili Romli. 2006. Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan. *Jurnal Politika*. 2(2). 14-17

<sup>2</sup> Richard S. Katz, William Crotty. 2014. *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media. Hlm 65

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 404

Partai politik merupakan wadah representasi dan penyalur aspirasi dari masyarakat ataupun dari pemerintahan.<sup>4</sup> Banyak peran dan fungsi dalam tubuh partai politik, menjadikan partai politik sebagai instrument esensial dalam dinamika demokrasi kontemporer. Partai politik adalah instrumen utama masyarakat untuk berkompetisi dan mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik. Untuk itulah keberadaan partai politik tidak hanya penting untuk keberlangsungan demokrasi, tetapi juga menjadi parameter kualitas dari demokrasi itu sendiri.

Dalam rangka memperkuat demokrasi modern, menurut Huntington yang terpenting bagi perbaikan kualitas demokrasi adalah tidak terletak pada keberadaan jumlah partai, tetapi sejauh mana kokohnya<sup>5</sup> dan adaptabilitas sistem kepartaian yang sedang berlangsung.<sup>6</sup> Agar sebuah kepartaian mampu menopang demokrasi dan stabilitas politik, pelebagaan kepartaian menjadi sebuah kebutuhan yang tak terhindarkan. Pelebagaan menjadi dimensi penting untuk memahami sistem kepartaian dalam negara demokrasi atau semi-demokrasi. Pemahaman terkait tingkat pelebagaan partai politik akan mempermudah dan memperjelas karakteristik penting dari sistem kepartaian.

---

<sup>4</sup> Partai politik mempunyai peran sebagai sarana penghubung yang sangat strategis antara pemerintahan dengan masyarakat sipil. Partai politik menjadi pusat rekrutmen dan sirkulasi elit politik, serta juga menjadi penghubung antara pemilih, proses pemilihan umum, dan pemerintah yang dihasilkan dari proses tersebut. Menurut Miriam budirdjo partai politik di negara demokrasi memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik (agregasi dan artikulasi), sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana pengatur konflik (*conflict managemen*). Untuk melihat analisis terkait representasi Rujuk Richard S.Katz, William Crotty. 2014. *Handbook Partai Politik*, Bandung: Nusa Media. Hlm 65-68.

<sup>5</sup> Ada dua kriteria sebuah sistem kepartaian yang kokoh. Pertama, partai memiliki kapasitas melancarkan perluasan peran serta politik melalui jalur partai dan dengan demikian mengalihkan segala kativitas politik anomik dan revolusioner. Kedua, ia mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi agar mengurangi kadar tekanan yang dihadapi oleh sistem politik. Lebih lanjut Rujuk Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarims. Hlm 64-65.

<sup>6</sup> Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. Hlm 64

Sistem demokrasi yang bercirikan kompetisi, meniscayakan terjadinya perebutan kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan melalui pemilihan, dan hanya bisa dilakukan oleh partai politik. Partai politik nantinya yang akan mengelola dan mengatur pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan oleh Mainwaring dan Scully yang dikutip oleh Andrey A. Meleshevich<sup>7</sup>:

“...an institutionalized party system, parties are key actors in determining access to power, open elections must be the real process in determining who governs and main actors must see them as such” (dalam suatu sistem partai yang melembaga, partai merupakan aktor kunci dalam menentukan akses kekuasaan, pemilihan yang terbuka merupakan keniscayaan proses politik dalam menentukan pemerintahan)

Partai politik harus mampu berfungsi untuk mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan, baik internal partai (pengurus, anggota) maupun eksternal partai (konstituen, masyarakat). Menghubungkan kepentingan masyarakat dan negara, untuk diproses dalam sistem politik dan memproduksi kebijakan publik. Kesehatan sistem politik dan demokrasi serta konsolidasi demokrasi ini memerlukan syarat yaitu salah satunya partai politik yang melembaga.<sup>8</sup>

Menurut Huntington, pelembagaan atau institusionalisasi adalah proses dengan mana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baik (*value*) dan stabil (*stability*).<sup>9</sup> Pelembagaan partai politik merupakan proses pematapan sikap dan perilaku partai politik yang terpola dan sistemik sehingga terbentuk suatu budaya

---

<sup>7</sup> Richard S Kartz. *Op.cit.*. Hlm1 338

<sup>8</sup>Wawan E Kuswandro. 2015. *Pelembagaan Partai Politik di Indonesia*, dalam <http://www.lecture.ub.ac.id/tag/pelembagaan-partai-politik-indonesia/ftn>. Diakses pada Tanggal 30 Maret 2019 Pukul 13.15 Wib

<sup>9</sup> Sigit. *Op.cit.* Hlm 64-65

politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi. Pelembagaan kepartaian akan menjadikan partai bekerja dalam koridor fungsi-fungsi yang semestinya, sekaligus meminimalisasi perubahan partisipasi politik yang tidak perlu.

Partai politik pada Era Reformasi mendapatkan ruang yang luas untuk mewujudkan diri sebagai organisasi yang memiliki peran dan fungsi memobilisasi kepentingan sekaligus memberi legitimasi pada proses-proses politik. Upaya untuk membentuk dan memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik melalui perundang-undangan mulai dilakukan pemerintahan sejak awal Reformasi. Pada masa transisi ke era Reformasi, Bacharuddin Jusuf Habibie membentuk kebijakan pengaturan terkait partai politik pertama kali melalui diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1999. Peraturan ini mengalami perubahan/amandemen pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri menjadi UU No. 31 Tahun 2002.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono regulasi terkait partai politik mengalami 2 kali amandemen. Pertama amandemen menjadi UU No 2 Tahun 2008. Kedua, pada tahun 2011 amandemen terjadi pada pasal 5 UU No 2 Tahun 2008 yang membahas terkait pendanaan partai politik. Hingga saat ini pembahasan terkait partai politik di atur pada UU No. 2 Tahun 2011. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga mencantumkan upayanya dalam memperbaiki sistem kepartaian di Indonesia, melalui Sembilan agenda prioritas pemerintahan.<sup>10</sup>

Perubahan dan amandemen partai politik ini terus menjadi agenda perbaikan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Sebagai salah satu upaya penguatan partai politik melalui suatu set peraturan formal. Namun

---

<sup>10</sup> Sembilan Agenda Prioritas atau disebut juga dengan Nawacita merupakan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan jokwi-jk kalau terpilih. Upaya penguatan partai terdapat pada point kedua dari sembilan agenda prioritas, dapat dilihat melalui website kpu.go.id.

meskipun ada usaha perbaikan di tubuh partai politik oleh pemerintahan, partai politik di era reformasi ini banyak mengalami permasalahan di internal tubuh partai politik yang membuat partai politik harus menghadapi krisis kepercayaan publik. Munculnya ketidakpercayaan publik terhadap partai politik dapat dilihat dari hasil lembaga survei terhadap kepercayaan publik yang mendapati perpartai politik menempati urutan terendah dibandingkan institusi-institusi politik lainnya.<sup>11</sup>

Teguh Imansyah mengemukakan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dapat dilihat dari fenomena yang terjadi di lingkaran partai politik. Keadaan tersebut dapat terlihat dari kasus-kasus tindak pidana korupsi di lingkungan partai politik, menurunnya produktivitas kinerja lembaga legislatif yang terjadi diakibatkan oleh lemahnya dimensi ideologi. Manajemen organisasi yang tidak transparan, oligarkis dan transaksional dalam tubuh partai, menjadikan partai politik saat ini pragmatis. Penguatan pragmatisme partai politik merupakan dampak dari gagalnya partai politik dalam menjalankan sistem kaderisasi.<sup>12</sup>

Lili Romli juga mengemukakan, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik diakibatkan oleh ketidakmampuan partai politik dalam memainkan fungsinya dengan optimal. Kondisi ini ditambah dengan persoalan pelembagaan parpol yang belum terwujud dengan baik.<sup>13</sup> Partai-partai kerap mengalami konflik yang menguras tenaga dan waktu sehingga tidak ada waktu

---

<sup>11</sup> Merdeka.com. 2018. Survei Charta Politika: Kepercayaan Publik Terhadap Parpol Masih Rendah (*online*). Diakses di (<https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html>) pada Tanggal 10 Maret 2019 Pukul 23:45 WIB

<sup>12</sup> Teguh Imansyah. 2012. Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. *Jurnal Rechtsvinding*. 1(3). 21-23

<sup>13</sup> Ugm.ac.id. 2012. Kelembagaan Partai Politik Indonesia Masih Lemah (*online*). Diakses di (<https://www.ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan-partai-politik-indonesia-masih-lemah>). Pada Tanggal 11 Maret 2019 Pukul 12:35 WIB

untuk membangun pelebagaan partai politik. Elite-elite partai pun belum menjadikan AD/ART sebagai satu-satunya aturan dalam mengelola partai politik. Ditambah lagi tradisi berpartai yang menghormati perbedaan budaya politik demokrasi di kalangan elite partai belum tumbuh. Unsur patrimonialisme dan bahkan feodalisme masih kuat di kalangan elite partai.

Banyaknya persoalan yang muncul atau belum selesai di tubuh partai kini terjadi bukan hanya karena partai politik tidak atau belum mampu memainkan dan menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki dengan optimal, tetapi juga menunjukkan bukti bahwa partai politik di Indonesia saat ini tidak terlembaga atau pelebagaannya masih lemah.

Firman Noor mengemukakan pembahasan terkait kondisi kepartaian masih cukup jauh untuk dikatakan terlembaga. Tingginya Volatilitas dan *swing voters* mengindikasikan bahwa partai politik tidak mengakar pada masyarakat.<sup>14</sup> Nurlatipah Nasir juga mengemukakan tingginya angka *electoral volatility* di Indonesia disebabkan oleh lemahnya pelebagaan partai politik terkhusus pada derajat *systemness*, *value infusion* dan reifikasi.<sup>15</sup>

Ketidakstabilan perolehan suara dan banyaknya polemik di tubuh partai politik selama Era Reformasi, menuntut partai politik untuk mampu beradaptasi dan mengimbangi perkembangan politik. Ada beberapa partai yang masih terus bertahan dan memiliki perolehan suara yang stabil seperti partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan). Berikut

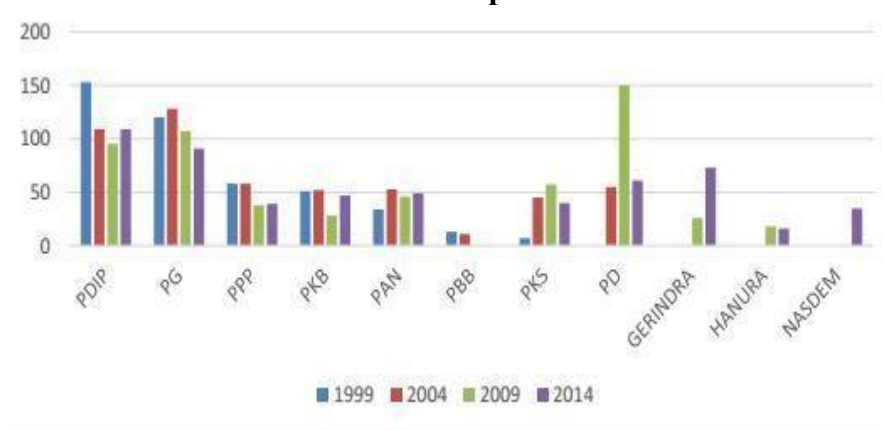
---

<sup>14</sup> Firman Noor. 2012. Evaluasi Kondisi Kepartaian 14 Tahun Reformasi dalam Perspektif Pelebagaan Sistem Kepartaian. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 38(2). Hlm 25

<sup>15</sup> Nurlatipah Nasir. 2016. Electoral Volatility dalam Perspektif Kelebagaan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen. *Jurnal Politik Profetik*. 4(1). Hlm 43

perolehan kursi dari pemilu pertama setelah reformasi yaitu tahun 1999 sampai pada pemilu terakhir tahun 2014 grafiknya sebagai berikut:

**Grafik 1.1**  
**Perolehan Kursi di DPR-RI oleh Parpol Pada Pemilu 1999-2014**



Sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

Bedasarkan hasil pemilu dari tahun 1999 sampai 2014 yang ditampilkan grafik di atas dapat dilihat bahwa ada ketidakstabilan perolehan kursi antar partai dari pemilu tahun ke tahunnya. Namun 2 partai lama, Partai Golkar dan PDI Perjuangan berdasarkan grafik di atas selalu menempati urutan perolehan suara 2 teratas.<sup>16</sup> PDI Perjuangan yang merupakan pemenang pada pemilu tahun 1999 terus mengalami penurunan perolehan suara pada pemilu-pemilu setelahnya. Partai Golkar pada pemilu tahun 1999 meraih suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan, meski tidak mampu mempertahankan dominasinya seperti di era Orde Baru, Partai Golkar masih menjadi partai yang pemilihnya stabil pada pemilu-pemilu setelahnya.

<sup>16</sup> Kecuali pada pemilu tahun 2009, dimana perolehan suara tertinggi diperoleh oleh partai Demokrat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Partai politik dituntut untuk senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas organisasinya baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Partai Golkar dan PDI Perjuangan merupakan partai transformasi yang lahir pada saat runtuhnya Orde Baru. Kedua partai ini sama-sama mengawali karir kepartaian pada pemilu 1999. Secara nasional, PDI Perjuangan merupakan partai kuat yang mampu menjadi pemenang pemilu tahun 1999, 2014 dan 2019 dan Partai Golkar sebagai partai perolehan suara terbesar kedua. Memiliki kesejarahan partai yang hampir sama. Partai Golkar dan PDI Perjuangan memiliki dinamika perolehan suara yang sangat berbeda di Sumatera Barat.

Pada konteks perpolitikan Sumatera Barat, perolehan suara antara keduanya sangat jauh. Dimana Partai Golkar berhasil menjadi partai pemenang dengan suara mayoritas, sedangkan PDI Perjuangan menjadi partai minoritas dengan sedikit pemilihnya pada setiap pemilu. Berikut adalah komposisi perolehan kursi parpol di Sumbar pada pemilihan anggota DPR RI selama Era Reformasi:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Pileg DPR RI Era Reformasi di Sumatera Barat**

Partai Politik	Jumlah Kursi				
	1999	2004	2009	2014	2019
Golkar	4	4	3	2	2
Gerindra	-	-	-	2	3
PDI-P	2	-	-	2	-
Demokrat	-	1	5	2	2
Nasdem	-	-	-	1	1
PBB	1	-	-	-	-
PKS	1	2	2	2	2
PPP	3	2	2	2	1
PAN	3	2	2	1	3
PBR	-	1	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

*Sumber: Data Sekunder Diolah Peneliti*



Bedasarkan table diatas, selama Reformasi di Sumbar Partai Golkar mampu mempertahankan dominasinya dan tetap menjadi partai pemenang yang mendapatkan kursi anggota DPR RI yang cukup banyak. Berdasarkan tabel bisa dilihat PDI Perjuangan hanya mendapatkan kursi anggota DPR RI pada pileg 1999 dan 2014 saja. Sedangkan pada tahun 2019 PDI Perjuangan harus kehilangan 2 kursi anggota DPR RI yang telah didapatkan pada pemilu sebelumnya. Kekalahan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 di akibatkan masifnya isu politik identitas di Sumatera Barat.

Perolehan suara PDI Perjuangan yang cenderung rendah dan tidak pernah menjadi pemenang di Sumatera Barat serta perolehan suara yang dominan oleh Partai Golkar di jelaskan alasannya oleh Israr Iskandar dosen ilmu sejarah Unand yaitu karena adanya faktor sejarah yang melekat terhadap masing-masing partai sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat Sumatera Barat terhadap kedua partai ini.

PDI Perjuangan di Sumatera Barat menjadi partai yang tidak populer dan selalu mendapatkan perolehan suara yang sangat sedikit dipengaruhi oleh nilai-nilai partai yang erat kaitannya dengan Soekarno. Hal ini dikemukakan oleh Israr Iskandar:<sup>17</sup>

“....PDIP, yang tidak punya basis kuat di daerah ini. PDIP (dalam batas tertentu) dianggap sebagai “reinkarnasi” PNI, partai besutan Proklamator dan Presiden pertama, Soekarno.”

Israr Iskandar menjelaskan alasan PDI Perjuangan di Sumbar dianggap sebagai reinkarnasi dari partai PNI. Sejarah mencatat, pada Pemilu 1955, PNI hanya

---

<sup>17</sup> Unand.ac.id. Israr Iskandar: Jokowi dan Minang (*Online*). Diakses di (<https://www.unand.ac.id/id/berita-peristiwa/berita/item/2400-jokowi-dan-minang.html>.) Pada Tanggal 10 April 2019 Pukul 20:00 WIB

memperoleh 1 persen suara di Sumbar. Bandingkan partai-partai Islam; Masyumi 49 persen, Perti 28 persen, dan PSII 3 persen. PKI bahkan mendapatkan 7 persen di Sumbar. Artinya, pada dekade 1950-an (bahkan kemudian dekade 1960-an, khususnya pasca-PRRI),<sup>18</sup> politik berhaluan “Soekarnoisme” tidak populer di tanah Sumbar.

Pada era Orde Baru, hampir setiap wilayah di Indonesia di menangkan oleh Golkar, termasuk Sumatera Barat yang juga pada masa ini didominasi Golkar. Adanya proyek *deidiologisasi politic* pada rezim Soeharto membuat PNI dan eks parpol lama lainnya kian terpuruk. Golkar sebagai partai yang didukung pemerintah semakin Berjaya. Keanggotaan Golkar yang terdiri dari unsur Militer, PNS juga memudahkan Golkar menjamur di kalangan masyarakat. Fakta sejarah ini telah membangun Citra dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan di tengah masyarakat Sumbar hingga saat ini.

Partai harusnya mampu menjelmakan institusinya sebagai institusi yang memiliki nilai positif sehingga mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya. Adanya kasus penyelewengan kekuasaan ditubuh partai politik berupa dominasi tokoh telah menarik peneliti untuk melihat peran tokoh

---

<sup>18</sup> Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami periode ketidakstabilan saat berjuang dengan pembangunan ekonomi, utang luar negeri, dan kegagalan tata kelola. Tantangan ini diperparah oleh fakta bahwa negara yang baru terbentuk itu terdiri dari banyak provinsi yang beragam dan terpecah-pecah dan tidak semua dari mereka puas dengan arah Jawa-sentris yang diambil negara ini di bawah pemerintahan Sukarno. Akibatnya, dari tahun 1958-1961 beberapa provinsi di Sumatera mendeklarasikan kemerdekaannya dan berusaha untuk berpisah dari negara-bangsa baru Indonesia. Dikenal sebagai Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), gerakan itu dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintah pusat dan pasukan militer dikirim ke Sumatera untuk menemukannya. Tindakan keras terhadap gerakan PRRI menyebabkan luka yang dalam dan lama di kalangan generasi tua Minangkabau. Para pemimpin PRRI dibujuk oleh pemerintah Sukarno untuk bernegosiasi tetapi mereka semua ditangkap dan dikirim ke penjara. Selama konflik, ribuan orang Minangkabau menjadi korban keganasan tentara pemerintah dan banyak yang mengungsi dari Sumatera.

sentar di tubuh Partai Golkar dan PDI Perjuangan di Sumbar.

Tokoh sentral ini dikaitkan dengan pemimpin kedua partai tersebut. Di Sembar kepengurusan daerah DPD dari partai Golkar Ir. H. Hendra Irwan Rahim dan DPD PDI Perjuangan Alex Indra Lukman, merupakan pemimpin partai tingkat provinsi yang terpilih selama dua priode berturut- turut. Ir H Hendra Irwan Rahim menjadi DPD Partai Golkar dari tahun 2009-2015 dan terpilih lagi untuk periode 2016-2020. Alex Indra Lukman menjadi DPD Partai Golkar dari tahun 2010-2015 dan terpilih lagi untuk periode 2015-2020.

Pelebagaan partai politik menjadi faktor penting untuk partai mendapatkan kestabilan perolehan suara. Pembahasan terkait pelembagaan partai politik yang dikaji oleh Vicky Randall dan Lars Svasand berusaha menjelaskan pelembagaan partai politik dari dua aspek, pertama yaitu aspek internal-eksternal dan kedua aspek struktural-kultural. Persilangan kedua aspek ini nantinya memunculkan empat dimensi yang bisa digunakan sebagai indikator untuk membantu melihat bagaimana pelembagaan sebuah partai politik. Keempat dimensi hasil persilangan kedua aspek pelembagaan tersebut adalah *systemness*, *decisional autonomy*, *value infusion*, dan *reification* (derajat kesisteman, otonomi pengambilan keputusan,derajat identitas nilai, dan reifikasi).<sup>19</sup>

Indikator-indikator pelembagaan partai politik hasil pemikiran Vicky Randall dan Lars Svasand inilah yang nantinya akan membantu peneliti dalam melihat seperti apa pelembagaan yang dimiliki Partai Golkar dan PDI Perjuangan di Sumatera Barat sehingga mempengaruhi perolehan suara kedua partai tersebut. Peneliti tertarik dengan topik bahasan ini karena sadar akan pentingnya

---

<sup>19</sup> Vicky Randall and Lars Svasand dalam Muhammad Ridha T.R, op.cit., hlm.170.

pelebagaan bagi keberlangsungan partai politik dalam menjalankan fungsinya.

Partai Golkar dan PDI Perjuangan dilihat dari segi struktural merupakan partai dengan stuktur yang lengkap, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu Partai Golkar dan PDI Perjuangan juga memiliki badan-badan dan sayap partai yang berfungsi mendukung serta mensukseskan kebijakan dan juga kegiatan partai. Hal ini dijelaskan oleh dimensi identitas nilai yang dikemukakan oleh Randal dan Svasand.

Asumsi penelitian yang peneliti bangun disini adalah bahwa perbedaan perolehan suara yang signifikan ini dipengaruhi oleh pelembagaan partai terkhusus pada indikator identitas nilai dan reifikasi. Asumsi yang peneliti bangun ini didasarkan atas fakta-fakta yang telah peneliti temukan berkaitan dengan Partai Golkar dan PDI Perjuangan di Sumatera Barat.

Bedasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mencoba memfokuskan penelitian tentang pelembagaan Partai Golkar dan PDI Perjuangan di tingkat DPD Provinsi Sumbar yang akan dikaji bedasarkan dimensi-dimensi dari Teori Pelebagaan Partai Politik Randal dan Svasand. Konsep dan fenomena yang telah dipaparkan di atas memunculkan pertanyaan dari peneliti yakni: Bagaimana penerapan Pelebagaan Partai Golkar dan PDI Perjuangan di Sumatera Barat jika dipaparkan bedasarkan penerapan teori Randal dan Svasand?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelebagaan Partai Golkar dan PDI Perjuangan di Sumatera Barat berdasarkan pada penerapan Dimensi-Dimensi Pelebagaan dari teori Pelebagaan Partai Politik Vicky Randall dan Svasand.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kontribusi dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam memahami penggunaan konsep pelebagaan politik partai politik.
2. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka dibidang ilmu politik, menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya-karya ilmiah, serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang relevan.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh objek terkait untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan pelebagaan partai politiknya.